

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemu-penemu baru, serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan hubungan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri mempunyai peran sebagai pemberi dana (*public fund*) kepada pemerintah. Keberhasilan pemerintah sebagai organisasi sektor publik akan dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas dari pemerintah merupakan salah satu indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Menurut Mahmudi (2010) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku keuangan. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja didalamnya (Satuan kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja daerah kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD.
2. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*),

yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditur, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Sumber untuk menganalisis laporan keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Kabupaten Rokan Hulu dibentuk pada tahun 1999. Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, namun mulai efektif ditahun 2015. Dalam penelitian ini data laporan keuangan yang diolah yang berakhir ditahun 2014, sehingga masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dan telah mampu membuat peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2012 berupa laporan keuangan daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan daerah dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah diantaranya adalah dengan menghitung rasio

lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan, kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis rasio keuangan diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam perkembangan suatu daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Kualitas laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari hasil opini auditor bahwa laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2013 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Ini adalah pertama kalinya Kabupaten Rokan Hulu menerima opini WTP-DPP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, setelah beberapa tahun sebelumnya opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk tahun anggaran 2014 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Namun BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu permasalahan yang muncul dari kelemahan tersebut adalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu pemerintah yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mencerminkan prestasi kerja dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan laporan keuangan menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dari waktu ke waktu selama 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

3. Bagi peneliti yang lainnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas pada tahun anggaran 2010-2014. Dari semua rasio keuangan yang terdapat pada akuntansi sektor publik penulis hanya menggunakan

lima rasio keuangan yaitu rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muhibtari tahun 2014 dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012”. Hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kota Magelang berada pada kriteria instruktif. Tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang masih kurang, namun, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efisien. Rasio keserasian belanja menunjukkan keseimbangan antar belanja belum seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih belum ideal. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian terdahulu pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang selama lima tahun periode 2008-2012, sedangkan objek

penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun periode 2010-2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan tentang definisi laporan keuangan, komponen laporan keuangan, analisis laporan keuangan, kinerja keuangan, dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas bagaimana menghitung rasio keuangan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pihak instansi yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Laporan Keuangan

Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas.

Menurut Nordiawan, dkk (2009) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Menurut Bastian (2010), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dari beberapa pengertian laporan keuangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi penting yang menggambarkan posisi keuangan dan dampak keuangan dari transaksi organisasi sektor swasta (perusahaan) atau organisasi sektor publik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkualitas.

2.2 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Operasional (LO)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara

efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan –LRA

Pendapatan–LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus/defisit LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika jumlah pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut, begitu pula sebaliknya, defisit-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu periode pelaporan tersebut.

5. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan anggaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA/SiKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing maka harus dicatat/dibukukan dalam mata uang rupiah atau konversi terlebih dulu ke rupiah.

2.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih baik pada

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

2.2.3 Neraca

Menurut Hafiz (2012), neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada umumnya entitas akuntansi menyajikan aset menjadi aset lancar dan aset tidak lancar serta menyajikan kewajiban menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apabila entitas tersebut memilih untuk tidak menyajikan aset dan kewajibannya seperti yang telah disebutkan, maka penyajian dalam neraca akan dilakukan berdasarkan likuiditas.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

2.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Menurut Nordiawan, dkk (2009:165) laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi yang tersedia dalam laporan ini berguna untuk membantu pembaca laporan keuangan untuk memprediksi kebutuhan kas masa depan, kemampuan entitas dalam menghasilkan kas, dan perubahan dana yang diakibatkan kegiatan operasional.

Dalam penyajiannya, laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

1. Arus kas berdasarkan aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Arus kas berdasarkan investasi nonkeuangan mencerminkan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
3. Arus kas berdasarkan pembiayaan mencerminkan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas masuk antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan.
4. Arus kas berdasarkan aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

2.2.5 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
3. Tranfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

4. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas pelaporan.

2.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

2.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan dan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Prastowo (2011), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap (2009), analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Menurut Mahmudi (2010) analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau budaya.

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka diperlukan penguasaan terhadap:

1. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi)
2. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan
3. Teknik analisisnya

4. Segmen dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional.

Menurut Mahmudi (2010) salah satu tehnik untuk melakukan analisis laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

2.4 Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2010), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan.

Menurut Nordiawan (2011), pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan

memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Menurut Mahmudi (2013) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja keuangan, yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Adapun kriteria kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

Nilai Rasio lancar	Kemampuan keuangan
Rasio lancar < 1	Kurang lancar
Rasio lancar = 1	Cukup lancar
Rasio lancar > 1	Lancar

Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utang jangka pendek melalui aset lancarnya semakin baik. Dan jika sebaliknya semakin rendah nilai rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah dalam melunasi utang jangka pendek melalui aset lancarnya kurang baik.

2. Rasio Kas (*Cash Rasio*)

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar.

Adapun kriteria kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

Nilai Rasio kas	Kemampuan keuangan
Rasio kas < 1	Kurang lancar
Rasio kas = 1	Cukup lancar
Rasio kas > 1	Lancar

Semakin tinggi nilai rasio kas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi utangnya yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek yang dapat segera diuangkan semakin baik. Dan sebaliknya semakin rendah nilai rasio kas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi utangnya yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek yang dapat segera diuangkan kurang baik.

3. Rasio Utang Terhadap Ekuitas

DER adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah terbebani oleh utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah sudah kelebihan utang (*over-leveraged*), dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang.

Adapun kriteria kemampuan daerah sebagai berikut:

Nilai rasio utang terhadap ekuitas	Kemampuan keuangan Daerah
Rasio DER >1	Kurang baik
Rasio DER = 1	Cukup baik
Rasio DER < 1	Baik

Semakin rendah nilai rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang kurang baik .

4. Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah

Rasio utang terhadap pendapatan mengukur besarnya jaminan pendapatan untuk membayar total utang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total utang dengan pendapatan. Variasi dari rasio utang terhadap pendapatan misalnya adalah rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, dan rasio utang terhadap pendapatan pajak.

Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman.

Adapun kriteria kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

Nilai rasio utang terhadap pendapatan Daerah	Kemampuan keuangan Daerah
Rasio >1	Beresiko Tinggi
Rasio = 1	Cukup Berisiko
Rasio < 1	Risiko Rendah

Semakin rendah nilai rasio utang terhadap pendapatan daerah menggambarkan jaminan pendapatan pemerintah daerah dalam membayar utang semakin baik. Artinya Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan baik jika memiliki resiko rendah apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu).

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dapat penulis kemukakan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhibtari tahun 2014 dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2008-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang diolah adalah ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang. Analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah

dengan menghitung *Share* dan *Growth*, peta kemampuan keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kota Magelang berada pada kriteria instruktif. Tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kota Magelang masih kurang, namun, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang terbilang sangat efisien. Rasio keserasian belanja menunjukkan keseimbangan antar belanja belum seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth*, posisi Kota Magelang berada pada kuadran II. Dilihat dari hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan Kota Magelang, kemampuan keuangan Kota Magelang tergolong tinggi.

2. Penelitian yang dilakukan Astuti tahun 2013 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2007 sampai 2011. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu peneliti menggunakan analisis rasio keuangan daerah khususnya analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007

tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisiensi karena di bawah angka 1%. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jl.Tuanku Tambusai KM 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi suatu kondisi dengan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, penulis akan mendeskripsikan tentang laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk data-data yang ada pada laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu meminta data yang sudah ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan meminta atau mengambil dokumen berupa data laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Adapun rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Nilai Rasio Lancar:

Kurang Lancar : Rasio Lancar < 1

Cukup Lancar : Rasio Lancar = 1

Lancar : Rasio Lancar > 1

3.5.2 Rasio Kas

Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas+Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

Nilai Rasio Kas:

Kurang Lancar : Rasio Kas < 1

Cukup Lancar : Rasio Kas = 1

Lancar : Rasio Kas > 1

3.5.3 Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

Nilai Rasio DER :

Kurang : Rasio DER > 1

Cukup : Rasio DER = 1

Baik : Rasio DER < 1

3.5.4 Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah

Variasi dari rasio utang terhadap pendapatan misalnya adalah rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), rasio utang terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio utang terhadap pendapatan pajak. Rasio utang terhadap pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Nilai Rasio :

Risiko Tinggi : Rasio > 1

Cukup Berisiko : Rasio = 1

Risiko Rendah : Rasio < 1

3.6 Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

Table 3.1
Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Waktu
Pembuatan psoposal	1. Pengajuan judul 2. Rencana pencarian data 3. Pembuatan proposal 3 bab 4. Revisi dengan pembimbing	7 minggu
Seminar Proposal	Pelaksanaan Ujian Proposal	1 minggu
Penulisan Skripsi	1. Penyusunan data penelitian 2. Perbaikan proposal hasil seminar 3. Pemuatan skripsi (lanjutan) 4. Revisi dengan pembimbing	6 minggu
Sidang skripsi	Pelaksanaan ujian sidang skripsi	1 minggu
	Total kebutuhan	15 minggu